

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PENGGARAPAN TANAH DENGAN SISTEM BAGI HASIL MENURUT HUKUM ADAT DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA



Oleh:

DRS. SYAMSUDDIN RANJA
NIP. 150 228 881

PUSAT PENELITIAN
IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG
1998

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PENGGARAPAN TANAH DENGAN SISTEM BAGI HASIL MENURUT HUKUM ADAT DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA



Oleh:

DRS. SYAMSUDDIN RANJA
NIP. 150 228 881

PUSAT PENELITIAN
IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG
1998

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG Pandang
PUSAT PENELITIAN

Jl. Sultan Alauddin. No. 63. Telp. 864928 - 864931 (Fax 864623)

SURAT KETERANGAN

No. PI/TL.01/ 025 /1999

Kepala Pusat Penelitian IAIN Alauddin Ujung Pandang, menerangkan bahwa :

Nama : ..Drs..Syamsuddin..Ranja.....

NIP. : ..150 228 881.....

Pangkat Golongan : ..Lektor..Muda../...III/c.....

Unit Kerja : ..Fakultas..Syariat..ah..IAIN..Alauddin..U..Pandang

Judul Penelitian : .."PENGGARAPAN..TANAH..DENGAN..SISTEM..BAGI.....

HASIL MENURUT HUKUM ADAT DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM

DI KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA"

Yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian tahun 1998/1999 dan telah diseminarkan pada seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ujung Pandang. 30 Maret 1999

Wassalam

Kepala,

} Dr. Moh. Natsir Mahmud, MA.
NIP. 150 217 170

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG Pandang
PUSAT PENELITIAN

Jl. Sultan Alauddin. No. 63. Telp. 864928 - 864931 (Fax 864623)

KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah, syukur dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah swt., oleh karena dengan Hidayat dan TaufikNya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

IAIN Alauddin melalui Pusat Penelitian selalu berupaya agar para dosen senantiasa menaruh minat dalam melaksanakan penelitian. Sebab, penelitian sebagai dharma ke-2 dari Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu terus digalakkan untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian, ilmu pengetahuan akan mengalami stagnasi sehingga tidak mampu menjawab tantangan kemajuan zaman dan kebutuhan pembangunan bangsa.

Kami mengharapkan agar penelitian ini dapat menambah khazanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu Keislaman. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara peneliti atas jerih payahnya melaksanakan penelitian. Semoga Allah swt, memberikan pahala yang setimpai. Amin.

Ujungpandang, Desember 1998

Wassalam
Kepala,

} Dr. Moh. Natsir Mahmud, MA.
NIP. 150 217 170

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL AKHIR PENELITIAN

Tahun ..1998/1999

1. a. Judul Penelitian : "PENGARAPAN TANAH DENGAN SISTEM BAGI
HASIL MENURUT HUKUM ADAT DITINJAU DARI
SEGI HK, ISLAM DI KEC. BONTONOMPO KAB. GOWA"
- b. Macam Penelitian : () murni () terapan (v) pengembangan

2. Ketua Peneliti/Peneliti

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Syamsuddin Ranja
- b. Jenis Kelamin : I/P
- c. Pangkat/Gol. dan NIP : Lektor Muda /III/c /150228881
- d. Jabatan sekarang : Ketua Jurusan Mu'amalah
- e. Fakultas / Jurusan : Syariah IAIN Alauddin U. Pandang
- f. Bidang ilmu yang diteliti : Sosial Budaya

3. Jumlah Peneliti :1.....orang

4. Lokasi Penelitian : Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan, sebutkan :

- a. Nama Instansi : IAIN Alauddin Ujungpandang
- b. Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 63 U. Pandang

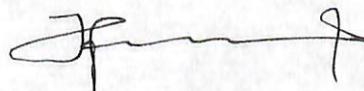
6. Jangka Waktu Penelitian : 6...(enam)...bulan

7. Biaya : Rp...1.000.000.- (Satu Juta Rupiah)

Ujungpandang...30...Maret.....1998

MENGETAHUI
KEPALA PUSAT
PENELITIAN IAIN ALAUDDIN

KETUA PENELITI /
PENELITI



DR. MOH. NATSIR MAHMUD, MA.-
NIP. 150 217 170

DRS. SYAMSUDDIN RANJA.-
NIP. 150 228 881

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kepada Allah swt., Tuhan yang telah memberikan petunjuk dan inayah-Nya kepada kita, sehingga peneliti sempat menyelesaikan penelitian ini sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Begitu pula shalawat dan salam atas Nabi Muhammad saw., sebagai *uswatun hasanah* dalam melaksanakan segala aktivitas manusia, dengan dasar kalam Ilahi yang diturunkan kepadanya, untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Selanjutnya peneliti menyampaikan bahwa dengan selesainya laporan hasil penelitian ini, peneliti tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Alauddin Ujungpandang yang sekaligus sebagai konsultan peneliti, di mana telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam pelaksanaan penelitian.

2. Bapak Gubernur KDH. Tingkat I Sulawesi Selatan Cq. Sospol yang telah memberikan izin penelitian di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa selama 5 (lima) bulan lamanya, yaitu dari bulan September 1998 s/d Januari 1999.

3. Bapak Bupati KDH. Tingkat II Gowa Cq. Kepala Kantor Sospol yang telah memberikan rekomendasi/izin penelitian yang ditujukan kepada Kepala Wilayah Kecamatan Bontonompo.

4. Kepala Wilayah Kecamatan Bontonompo, para Kepala Desa/Kelurahan se Kecamatan Bontonompo yang telah ikut serta membantu peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan sesuai rencana.

5. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujungpandang dan Bapak Kepala Balai Pusat Penelitian atas motivasi dan bimbingannya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, baik moril maupun materil, peneliti menyampaikan terima kasih, semoga Allah swt. senantiasa merahmati kita semua.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga ada manfaatnya dan kepada Allah swt. jualah kita berdo'a mudah-mudahan mempunyai nilai ibadah di sisi-Nya.

Ujungpandang, Maret 1999

Peneliti,

DRS. SYAMSUDDIN RANJA
NIP. 150 228 881

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Bagi Hasil	6
B. Rukun dan Dasar Bagi Hasil	11
C. Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian	15
D. Pelaksanaan dan Tujuan Bagi Hasil ...	18
E. Bagi Hasil Menurut Adat	21
F. Bagi Hasil Menurut Undang-Undang No- mor 2 Tahun 1960 (Tentang Perjanjian Bagi Hasil)	25
G. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil.	29
H. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil ..	35
BAB III. METODE PENELITIAN	43
A. Populasi dan Sampel	43
B. Instrumen Penelitian	45
C. Prosedur Pengumpulan Data	47
D. Teknik Analisa Data	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN	50
A. Jenis-jenis <i>Tesang</i> di Kalangan Masya- rakat Kecamatan Bontonompo	50
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil di Kecamatan Bontonompo	56

	Halaman
BAB V. P E N U T U P	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	62
KEPUSTAKAAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan lainnya tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian manusia memiliki modal, namun tidak bisa menjalankan usaha-usaha yang produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukannya. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.

Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama antara pemilik modal/pemilik tanah dengan penggarapnya yang kemungkinannya tidak memiliki tanah. Bentuk kerjasama seperti ini pihak si miskin yang tidak memiliki tanah akan sangat terbantu, dan para pemilik modal/pemilik tanahpun tidak pula dirugikan karena pemindahan penggarapan tanah kepada pihak lain.

Para pemilik tanah yang tidak mempunyai keahlian berusaha dalam bentuk yang produktif akan terpelihara harta yang dimilikinya serta ia akan menerima sebagian keuntungan disebabkan dengan adanya kerjasama antara pemilik modal/pemilik tanah dengan penggarap tanah.

Dewasa ini, masalah pertanahan sungguh sangat menarik perhatian, karena tanah itu merupakan kebutuhan, baik kepada orang yang masih hidup demikian juga kepada orang yang telah wafat.

Memang masalah pertanahan, yang juga mencakup masalah bagi hasil, perlu ditempatkan dalam kerangka pemikiran yang sedemikian penting, karena modal utama negara kita adalah tanah dan jumlah penduduk yang besar. Sistem bagi hasil pada hakekatnya dilihat sebagai pemanfaatan tanah oleh penggarap dan pemilik dalam suatu hubungan tertentu di antara kedua belah pihak.¹

Demikian pertambahan penduduk yang semakin pesat membuat perimbangan antara luas tanah garapan dan jumlah penduduk (petani) di pedesaan tampaknya semakin terasa.

Islam sebagai agama yang bersifat universal tidak hanya mengatur masalah syari'ah, tetapi juga mengatur masalah yang berkaitan dengan *mu'amalah mudharabah* (kerjasama bagi hasil), bahkan Islam juga sangat meng-

¹Halili Toha, dan Hari Pramono, *Majikan dan Buruh* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 11.

anjurkan agar manusia itu berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezki di atas bumi ini. Namun harus disadari bahwa Islam tidak meminta penganutnya sekedar bekerja, tetapi juga meminta agar mereka bekerja dengan tekun dan penuh semangat. Dengan pengertian yang lain, bekerja dengan tekun menyelesaikannya dengan sempurna. Menurut Islam, tekun dalam bekerja merupakan suatu kewajiban dan perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.

Berkaitan dengan penggarap dengan pemilik sawah atau ladang bukanlah hubungan kerja, melainkan hubungan bagi hasil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, bahwa:

Perjanjian dengan nama apapun juga yang akan diadakan antara pemilik dan penggarap diperlukan untuk menyelenggarakan usaha pertanian atau tanah milik itu dengan cara bagi hasil antara kedua belah pihak.²

Khusus masyarakat Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, pengelolaan tanah dengan sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah sudah lama dipraktekkan, namun dari segi pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun, hal ini disebabkan karena kuatnya pengaruh hukum adat dan ketaatan masyarakat yang cukup tinggi terhadap adat

² *Ibid.*, h. 311.

istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil menurut hukum adat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa ?

2. Bagaimana pengaruh hukum adat terhadap pelaksanaan penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa ?

3. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil terhadap masyarakat petani di Kecamatan Bontonompo ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksud meliputi:

1. Meneliti tentang pelaksanaan penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil.

2. Meneliti pengaruh hukum adat terhadap pelaksanaan sistim bagi hasil dilihat dari sudut Syari'at Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil menurut hukum adat.

2. Mengetahui apakah sistem penggarapan tanah tersebut sejalan dengan tuntunan ajaran Islam yang berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw.

3. Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil terhadap masyarakat tani.

4. Memperoleh informasi tentang masalah atau problema yang dihadapi oleh pemilik tanah dan penggarapan dalam sistem bagi hasil.

Sedang kegunaan penelitian ini diharapkan untuk:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam yang kaitannya dengan mu'amalah sistem bagi hasil.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, khususnya masyarakat tani, baik bagi pemilik modal/pemilik tanah maupun bagi penggarap.

3. Mengetahui sistem bagi hasil menurut hukum adat dan hukum Islam.

4. Mengetahui sistem penggarapan tanah dan bagi hasil menurut Hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bagi Hasil

Sebelum peneliti membahas tentang pengertian bagi hasil secara keseluruhan, maka terlebih dahulu diutarakan beberapa istilah yang kita temukan dalam Syariat Islam yang berkaitan dengan bagi hasil antara lain:

1. *Al-Musaqat* (المَسَاقَات)
2. *Al-Muzaraaah* (المَزَارَعَة)
3. *Mukhabarah* (مَهَابَرَة)

Ketiga kata tersebut di atas, oleh Abdur Rahman Al-Jazirih mengkombinasikan dengan mengemukakan sebagai berikut:

المزارعة ومساواة والمخابرة ونحوها الفاظها معان
الفلاح عليها الفقهاء .
Artinya:

Muzaraah, *musaqat* dan *mukabarah* dan semacamnya yaitu lafadz-lafadz yang mempunyai makna menurut istilah ahli fuqaha.¹

1. Al-Musaqat menurut pendapat fuqaha:

a. Menurut Taqyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini,

¹Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Alaa' Mazahibul Arba'ah*, Juz III (Mesir: Maktabah Wamathaba'ah, t.th.), h. 1306.

mengemukakan sebagai berikut:

المساقاة هي ان يعامل انسان على شحليمهر بالمقى
والتربية على ان مارزق الله تعالى ماثمر يكون بينها

Artinya:

Bagi hasil ialah mempekerjakan seseorang terhadap (atas) tanaman untuk menjaga suatu kebun dan memeliharanya dengan syarat apa yang direzkikan Allah dari buah itu adalah miliknya berdua.²

b. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengemukakan bahwa:

Musaqat ialah memberikan tanah atau sawah buat orang lain dengan syarat hasilnya dibagi dua atau terlebih kurang menurut perjanjian.³

c. Imam Syafi'i, mengatakan:

Musaqat ialah memperkerjakan seseorang untuk menjaga kebun agar tanam-tanaman di dalamnya supaya disirami menurut semestinya, dengan syarat kalau memberi, maka hasilnya itu menjadi milik berdua pula.⁴

d. Sedang Imam Malik mengemukakan bahwa:

المساقاة مطرحة فهو عقد على حرمه سجر ونخل وزرع ونحو
ذلك بسرائط مخصوصة .

Artinya:

Musaqat ialah suatu akad atas kebun dan pemeliharaan tanaman dan biji-bijian dan semacamnya dengan syarat-syarat tertentu.⁵

²Muhammad Taqyudd Abi Bakar bin Muhammad Al-Husainy, *Kifayatul Alkhyar*, Juz I (Bandung-Indonesia: Syarikah Maarif Lattabay Akhyar, t.th.), h. 306.

³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Jilid II (Cet. IV; Bandung: CV. Diponegoro, 1985), h. 45.

⁴Idris Ahmad, *Fiqhu Syafi'i*, Juz I (Cet. I; Jakarta: Wijaya, 1969), h. 77.

⁵Abdur Rahman, *op. cit.*, h. 21.

Dari berbagai ungkapan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dilihat dari segi redaksinya terlihat adanya perbedaan, akan tetapi bila dilihat dari segi maksud dan tujuannya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak terjadi perbedaan, karena semuanya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur sebidang tanah atau kebun yang diserahkan kepada orang lain untuk digarap.
- 2) Terjadinya Ijab dan Kabul antara pemilik tanah dan penggarap.
- 3) Adanya pembagian hasil antara pemilik dan pekerja sesuai dengan kemufakatan bersama antara pemilik tanah atau kebun dengan penggarap.

2. Mukhabarah

Dilihat dari segi pengertiannya dapat kita simak yang dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddiqy, bahwa:

Yang dimaksud dengan Mukhabara adalah paroan sawah atau ladang, sepedua atau sepertiga atau lebih atau kolam sedang benihnya ditanggung oleh si pemilik tanah.⁶

3. Muzaraah

Muzaraah menurut Prof.DR.TM Hasbi Ash-Shiddiqy adalah:

⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid II (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 70.

Paroan sawah atau ladang, sepedua atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedang benihnya ditanggung oleh penggarap.⁷

4. Bagi Hasil Menurut Para Ahli

a. Jenni seorang penulis yang cukup terkenal sesuai dengan bidang keahliannya mengenai bagi hasil mengutarakan sebagai berikut:

Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, di mana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dalam bentuk natural sesuai dengan perkembangan usaha tani.⁸

b. Kobler memberikan definisi tentang bagi hasil sebagai berikut:

Pengertian bagi hasil menunjukkan hubungan antara pemilik sebidang tanah atau orang lain yang berhak menggunakannya dengan menggarap. Bagi hasil merupakan suatu bentuk usaha di mana pemungutan bunga (*rentetrekter*) tindak mengeploitasi sarana usaha dengan kerja sendiri atau sebagai pengusaha yang memimpin semua fungsi perusahaan. Orang yang menguasai tanah dan menggarap membagi bersama hasil bidang tanah itu menurut perbandingan umum yang tetap atau menurut perbandingan yang ditetapkan secara khusus.⁹

c. Bagi hasil menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sebagai berikut:

⁷*Ibid.*, h. 69.

⁸A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 1.

⁹*Ibid.*, h. 3.

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak lain dalam Undang-undang ini disebut berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.¹⁰

Bertolak dari pengertian yang dikemukakan di atas, peneliti dapat memahami bahwa bagi hasil adalah pemberian tanah milik, baik berupa sawah atau kebun kepada orang lain untuk digarap dan dipelihara, sehingga dengan demikian dapat mendatangkan hasil, dan hasil tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Bagi hasil menurut Syari'at Islam, Jumhur Ulama membolehkannya seperti Imam Malik, Syafi'i At-Tsaur, Abu Yusuf Muhammad bin Al-Hasan, Murid-murid Imam Abu Hanifah, Ahmad dan Daud.

Adapun dasar hukum para ulama sehingga membolehkannya adalah hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل حبير بشطر ما يخرج منها من ثمر. ازرع فكان يعطر انواعه مائة وسق ثمانون وسق ثمر، وعشرون وسق شعير فقم عمر حبير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطع لهن من الماء والارض او يعط لهن فعنهن احدا والارض ومنهم من خا الراسق وكانت عائشة اختا رسول الله (رواه البخاري ومسلم)

¹⁰A.P. Parlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil* (Suatu Study Comparatif) (Bandung: Bandar Maju, 1991), h. 49.

Artinya:

Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi saw. menyerahkan sawah ladang dan tegal di Khaibar kepada penduduk Khaibar dengan menyerahkan separuh dari penghasilannya berupa kurma atau buah dan tanaman, maka Nabi saw. memberi isteri-isterinya seratus wasaq, delapan puluh wasaq kurma tamar, dan dua puluh wasaq sya'ier (*jawawut*). Kemudian di masa Umar r.a. membebaskan kepada isteri-isterinya Nabi saw. untuk memilih apakah minta tanahnya atau tetap minta bagian wasaq itu, maka di antara mereka ada yang memilih tanah dan ada yang meminta baginnya hasilnya berupa wasaq. A'isyah r.a. telah memilih tanah.¹¹

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa Nabi sendiri pernah melaksanakan bagi hasil, dengan memberikan sebidang tanahnya kepada penduduk khaibar untuk ditanami dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga kelak bila mendatangkan hasil, maka hasil tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

B. Rukun dan Dasar Bagi Hasil

1. Rukun Bagi Hasil

Ibnu Rusyd dalam kitabnya "Bidayatul Mujtahid" mengutarakan bahwa rukun bagi hasil terdiri dari empat macam, yaitu:

- ١ - المحل المحصور لها ٢ - والحزاء العمل بتعدد
- ٢ - وصفة العمل الذي تتمتعده عليه ٤ - والمدة التي
- تجوز وتتمتعده عليه.

¹¹Muhammad Fuad 'Adul Baqi, *Al-lu'lu Wal-Marjan*, Jilid II (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), h. 563.

Artinya:

- a. Tempat yang khusus bagi hasil
- b. Bagian yang ditentukan
- c. Sifat pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Waktu perjanjian bagi hasil.¹²

Imam Syafi'i selanjutnya mengemukakan rukun bagi hasil ke dalam empat unsur yaitu:

- a. Malik (yang punya kebun atau sawah)
- b. Amil (yang bekerja)
- c. Hasil
- d. Shigat, artinya aqad, umumnya: aku jadikan engkau pekerja dikebunku dan sebagainya lalu dijawab aku terima.¹³

Rumusan pendapat tersebut di atas, nampaknya terdapat perbedaan redaksi akan tetapi jika dicermati dari isi dan maksudnya kedua pendapat tersebut adalah sama. Rumusan ini peneliti memahami sebagai berikut:

- a. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa bagi hasil itu dapat dilakukan pada tempat bagi hasil (pada pohon korma dan anggur), sedangkan Imam Malik menegaskan bahwa bagi hasil dapat dilakukan terhadap pohon yang berumur lama.
- b. Isyarat yang kedua yang dapat dipahami adalah adanya kewajiban bagi penggarap untuk menyirami dan menjaganya.

Kebiasaan dalam bagi hasil yang biasa dituntut (dijadikan sebagai syarat) ialah menutup pagar, membersihkan saluran (sumber air), menyirami, membuahkan

¹² *Ibid.*, h. 22-23.

¹³ Abdurrahman al-Jaziry, *op. cit.*, h. 28.

korma. Kesemuanya ini menjadi tanggung jawab penggarap.

Ketentuan yang dimaksud di atas, merupakan syarat yang harus dilalui oleh penggarap dan telah menjadi ketentuan yang telah disepakati.

c. Isyarat yang ketiga adalah menetapkan hasil pada suatu pekerjaan yang telah disepakati antara penggarap dan pemilik tanah. Penentuan bagi hasil adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menjaga jangan sampai terjadi kesalah pahaman antara kedua pihak (pemilik dan penggarap). Oleh karena itu bila tidak terjadi penentuan hasil terlebih dahulu, maka kemungkinan besar dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Penentuan pembagian hasil bagi kedua belah pihak merupakan baik bagi pemilik sawah, kebun dan yang semacamnya perlu ada kejelasan, apakah hasil tersebut akan dibagi dua atautkah dibagi tiga dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam Kitab Al-Fiqhul Alaal Mazahibul Arbā'ah dikemukakan bahwa:

- ان تكون مخرمة بالمالك والمامل
- ان تكون تميب كل منها كالتماق والتك

Artinya:

- Sesungguhnya ditetapkan (ditentukan) bagiannya bagi pemilik dan pekerja.
- Sesungguhnya harus jelas bahagian dari keduanya (pemilik dan pekerja) seperti seperduanya, atau sepertiganya.¹⁴

¹⁴ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 28.

d. Isyarat yang keempat adalah persyaratan waktu perjanjian bagi hasil. Persyaratan ini, Fuqaha berpendapat bahwa waktu perjanjian boleh diadakan sebelum buah nampak matang.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Bagi Hasil

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa bagi hasil adalah memberikan sebidang tanah, apakah itu sawah, kebun dan sebagainya untuk digarap dan dipelihara, dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bagi hasil dalam syari'at Islam pada dasarnya dapat dibolehkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر النهور على ان ياملوها ويررئدو لهم بشرط ماخرج منها (رواه

Artinya:

(البخارى)

Dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. Memberikan kepada penduduk Khaibar Yahudi untuk mempekerjakan dan menanaminya dan mereka mensyaratkan apa yang keluar dari padanya (dari hasil tanaman itu).¹⁵

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari

¹⁵Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, Juz II (Kairo: Maktabah Wamathbaah Wa Auladuhu, t.th.), h. 79.

sahabat Jabir yang berbunyi:

عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث واربع والنصف
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرة فليزرها او-
ليعها وان لم يفعل فليك ارضه (رواه البخاري).

Artinya:

Dari Jabir r.a. berkata: Mereka menggarap tanah dengan sebagian, sepertiga, seperempat dan seperdua. Bersabda Rasulullah saw. barang siapa mempunyai tanah, maka pekejakanlah (adakanlah Muzara'ah) atau berikanlah kepada orang lain, dan kalau tidak sanggup, maka tahananlah tanah tersebut.¹⁶

Merujuk dari hadits yang dikemukakan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa bagi hasil itu dapat dibenarkan (dibolehkan) dalam Syari'at Islam, hal ini dapat dibuktikan dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan diikuti oleh para sahabatnya.

C. Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil pertanian yang dikenal dalam Islam adalah merupakan kesepakatan antara pemilik dan penggarap tanah masing-masing mempunyai tanggung jawab atas hasil yang diperolehnya tanpa ada yang dirugikan. Oleh karena itu diperlukan adanya pelaksanaan yang terencana dan tertata baik oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi antara pemilik dan penggarap. Transaksi antara pemilik dan penggarap hendaknya dilakukan secara

¹⁶ *Ibid.*, h. 79.

tertulis, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kecacuan dan pengingkaran di antara mereka dikemudian hari.

Transaksi ini telah dipertegas dalam surah al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَالْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبَانِ يَكْتُبُ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَثْ مِنْهُ شَيْئًا ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berumahlah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.¹⁷

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa apabila kita bermu'amalah tidak dengan secara tunai, maka hendaknya di antara kedua belah pihak menuliskannya sesuai aturan yang telah disepakati bersama secara adil dan jujur. Dengan demikian kesepakatan itu menunjukkan terjadinya ijab dan kabul, artinya penyerahan barang dari pemilik kepada penggarap sebagai tanda kesanggupan

¹⁷Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Pelita II, 1978/1979), h. 7.

kedua belah pihak.

Dalam ayat di atas terdapat kalimat:

اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه .

Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang mengadakan utang piutang atau bagi hasil dalam waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah menuliskannya.

Penulis dan persaksian utang piutang adalah merupakan salah satu bahagian yang perlu dipertimbangkan, termasuk di dalamnya bagi hasil yang memberikan tenggang waktu yang cukup lama. Oleh karena itu penulisan masih tetap dibutuhkan sebagai salah satu upaya mengantisipasi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian pendapat Fuqaha tersebut di atas tentang wajibnya penulisan dalam bermu'amalah bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan dan penipuan antara keduanya, karena hal tersebut memungkinkan terjadi bila bagi hasil bari diperjanjikan setelah buahnya nampak matang, sebab dalam ajaran Islam tidak dibenarkan untuk memakan harta saudaranya dengan jalan bathil, sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah an-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بالبطل ...

Terjemahnya:

Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan

harta sesamamu dengan jalan yang bathil.¹⁸

Ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa segala perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Syari'at Islam, seperti mengambil harta saudaranya atau mengambil dengan jalan penganiayaan, penipuan dengan jalan riba dan lain sebagainya, maka semuanya dikategorikan mengambil atau memakan harta saudaranya dengan jalan bathil, dan hal ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya.

Keterangan yang terkandung dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil yang ditunjukkan oleh Syari'at Islam adalah merupakan yang sangat menunjang berlangsungnya kelangsungan hidup umat manusia, oleh karena dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan antara pemilik tanah dan dengan penggarap agar tidak terjadi unsur-unsur penganiayaan antara kedua belah pihak.

C. Pelaksanaan dan Tujuan Bagi Hasil

Ajaran Islam adalah ajaran yang Universal, mencakup seluruh aspek kehidupan yang bersifat material maupun aspek spritual, bahkan kedua aspek tersebut dalam hukum Islam senantiasa menganjurkan agar memelihara keseimbangan antara kedua aspek tersebut. Kedua aspek ini

¹⁸ *Ibid.*, h. 122.

dalam ajaran Islam membuktikan keseimbangan antara material dan spritual dengan jalan mencari nafkah dunia dan akhirat sesuai dengan sabda Rasulullah saw., yang berbunyi:

اعمل لدنيك كأنك تعيش أبدي واعمل لآخرتك كأنك
تموت غداً.

Artinya:

Tuntutlah dunia seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, danuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari.¹⁹

Dalam mencari kebajikan di dunia ini, hendaklah sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam yaitu dengan mendapatkan dengan cara yang halal, sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah an-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالبطل ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang bathil ...²⁰

Dalam kitab tafsir al-Maraghi, ayat tersebut dijelaskan bahwa kata al-Bathil berasal dari al-Buthl yang berarti kesia-siaan, dan kerugian, menurut syara' adalah mengambil harta tanpa ada kerelaan dari pemiliknya.

Selanjutnya dalam tafsir al-Maraghi, dijelaskan bahwa:

Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang dimakan hartanya, masing-masing ingin menarik harta itu menjadi miliknya. Yang dimaksud memakan di sini adalah mengambil dengan cara yang bagaimanapun. Harta diungkapkan dengan kata makan karena ia merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan. Harta disandarkan kepada semua orang (kalian) dan tidak dikatakan, "janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain" dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa umat saling bahu membahu didalam menjamin hak-hak dan mashlahat-maslahatnya.²¹

Dengan demikian untuk menjaga sampai terjadi penyelewengan dengan cara yang bathil seperti pencurian, penganiayaan, penipuan dan sebagainya, maka Islam menunjukkan melalui sistim bagi hasil.

Pelaksanaan bagi hasil dimaksudkan untuk saling bantu membantu, saling bekerjasama antara pemilik dan penggarap, sehingga dengan demikian tidak terjadi penipuan dan penganiayaan, bahkan sebaliknya akan tercipta suasana keakraban dan solidaritas yang tinggi di antara mereka. Oleh karena itu ajaran Islam membenarkan bertani bagi petani dengan sistem bagi hasil.

Bertolak dari ungkapan tersebut di atas, peneliti dapat berkesimpulan bahwa:

²¹Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Alih Bahasa Bahrin Abu Bakar dan Harun Noe Aly, Juz V (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1986), h. 25.

1) Sistem bagi hasil dimaksud untuk memelihara manusia agar tidak memakan dan mengambil harta sesamanya dengan cara yang bathil. Karena dengan cara bathil berarti terjadi penganiayaan.

2) Sistem bagi hasil dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan antara pemilik dan penggarapan tanah, sebab terkadang orang mempunyai sawah yang luas namun tidak mampu untuk digarap, bahkan tidak punya keahlian untuk mengolahnya.

3) Dengan terciptanya hubungan antara pemilik dan penggarap tanah berarti tercipta pula lapangan pekerjaan dan sekaligus menumbuhkan suasana ukhuwah Islamiyah.

D. Bagi Hasil Menurut Adat

Perjanjian bagi hasil terhadap pertanahan dimaksudkan semua perjanjian, bukan tanah yang menjadi objek perjanjian, melainkan tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh perjanjian. Menurut hukum adat bukan tanah yang beralih dari pemilik tanah kepada penggarap, melainkan pemilik tanah atau penggarap hak tanah memberi kesempatan kepada orang lain untuk bekerja, menanam, memungut hasil dan menikmati hasil tanah itu bersama-sama dengan pemilik tanah atau pemegang suatu hak atas tanah itu.²²

²²H. Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 141.

Bentuk perjanjian seperti di atas dapat dikatakan berlaku hampir di seluruh Indonesia dengan berbagai istilah adat setempat seperti *Maro* di Jawa Tengah, *nengah* di Jawa Barat, *Tesang* di Sulawesi Selatan, *Toyo* di Minahasa Perduai di Sumatera.

Penelitian ini hanya membahas masalah bagi hasil dalam daerah hukum adat Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan karena Kecamatan Bontonompo berada dalam wilayah adat Sulawesi Selatan.

Masyarakat asli Sulawesi Selatan berada di bawah pengaruh kepercayaan kepada hiasan. Hiasan-hiasan itu misalnya bendera, pedang, selebar kain, yang kemungkinannya diperoleh secara rahasia di tempat-tempat tertentu yang menurut kepercayaan masyarakat tersebut mempunyai kekuatan gaib. Menurut kepercayaan penduduk setempat bahwa barang-barang tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, kesehatan, manusia untuk kebutuhannya serta ditunjuk budak-budak untuk mengurusnya. Lembaga tanah hiasan yang masih tersebar di Sulawesi Selatan seperti tanah Arajang, tanah gaukang, tanah mana'. Tanah-tanah itu pada mulanya dari kelompok-kelompok kecil, yang digarap setiap tahun untuk kepentingan raja dan keluarganya. Karena mereka merasa tidak cukup dengan hasil yang dicapainya dari arajang atau tanah gaukang, sementara kebutuhan-kebutuhan semen-

tara meningkat. oleh karena itu raja memerintahkan kepada masyarakatnya untuk mencetak sawah-sawah, kebun-kebun kolam-kolam ikan, untuk kemudian menggarapnya secara bagi hasil.²³

Keberadaan tanah arajang, tanah gaukang atau tanah kasuijang ini pada pokoknya bersumber pada aturan adat yang berlaku secara turun-temurun hingga sekarang.

Adapun istilah-istilah yang dipakai dalam bagi hasil di daerah ini misalnya *tesang tawa dua* (bagi hasil 1/2), *tesan tawa tallu* (bagi hasil 1/3).

Latar belakang timbulnya penggarapan dengan sistem bagi hasil menurut adat antara lain:

1. Bagi Pemilik Tanah

a. Memiliki tanah yang cukup luas, tetapi tidak profesional, dan tidak mempunyai kemampuan, kesempatan untuk mengelolah tanah itu.

b. Adanya kecenderungan memperoleh hasil tanpa bersusah payah, dengan jalan memberikan tanahnya kepada orang lain untuk digarap.

2. Bagi Penggarap

a. Penggarap tidak memiliki tanah garapan untuk digarapnya atau belum mempunyai pekerjaan tetap untuk menghidupi diri dan keluarganya.

²³ *Ibid.*, h. 142.

b. Penggarap mempunyai kelebihan waktu untuk menggarap, sebab tanah miliknya terbatas luasnya atau tanahnya sendiri tidak cukup.

c. Adanya kecenderungan untuk mendapatkan tambahan hasil garapan.

Pemilik dan penggarap mempunyai hubungan hukum yang dilandasi sifat kekeluargaan dan tolong-menolong di antara mereka, dan sebagai azas umum di dalam hukum adat apabila seseorang menamai tanah milik orang lain, apakah dia mendapat restu dari pemilik atau tidak, maka terlebih dahulu berkewajiban untuk menyerahkan sebahagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah tersebut. Dan nampaknya kebiasaan seperti ini terjadi di Kecamatan Bontonompo.

Sistem bagi hasil yang berlaku di Sulawesi Selatan, khususnya di Kecamatan Bontonompo masih bersifat tradisional tetapi penuh kekeluargaan, hal ini dapat dipahami oleh karena masing-masing pihak berkeinginan mendapatkan hasil yang maksimal atau manfaat dari bagi hasil tersebut, dan mereka mematuhi ketentuan adat dan perjanjian mereka yang telah disepakati bersama. Demikian halnya dengan orang yang baru bermukim/pendatang ke lingkungan mereka, dia harus mentaati adat kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut.

**E. Bagi Hasil Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960
(Tentang Perjanjian Bagi Hasil)**

Perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang sebagai pegangan adalah Pasal 1 huruf C Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 di mana pasal ini menegaskan pengertian perjanjian bagi hasil seperti dikutip terdahulu sebagai berikut: Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Seperti disebutkan di atas dengan nama apapun juga yang bermakna bahwa apapun namanya yang termasuk dalam hukum perjanjian bagi hasil dalam pengertian itu pula diberikan perumusan dari pada pengertian penggarap. Di mana penggarap itu bisa orang-orang bisa pula berupa badan hukum.

Menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang ini bahwa yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya kepunyaan sendiri maupun diperolehnya secara menyewa dengan perjanjian bagi hasil ataupun

secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar.

Maksud diadakannya pembatasan tersebut agar tanah-tanah garapan hanya digarap oleh orang-orang tani termasuk buruh tani dan termasuk pula agar supaya sebanyak mungkin dapat menyerap tenaga kerja di bidang pertanian khususnya buruh tani dapat memperoleh tanah garapan. Dengan adanya pembatasan itu pula akan dapatlah dicegah bahwa seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan yang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para petani kecil untuk memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3 hektar sebagai batas maksimum dipandang cukup memberi bekal hidup yang layak.

Apabila orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi hasil tanah garapannya akan melebihi 3 hektar diperkenankan menjadi penggarap, jika mendapat izin dari menteri muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. (Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960).

Jadi pada dasarnya seorang petani sudah mempunyai tanah garapan 3 hektar tidak diperkenankan mendapat tanah garapan lagi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung hal-hal yang khusus, dengan tidak meninggalkan garis

kebijaksanaan yang telah diletakkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang ini.

Perjanjian bagi hasil ini seperti dikatakan tadi yaitu dilakukan oleh kedua belah pihak dan berdasarkan pada ketentuan pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-undang ini. Bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa atau kepala kelurahan tempat pemilik dan penggarap. Sedangkan pada ayat 2 dikatakan bahwa ayat satu di atas memerlukan pengesahan dari Camat atau Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu.

Maksud dari ketentuan di atas adalah untuk menghindarkan keraguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Sedangkan perlu mendapat pengesahan dari camat dimaksudkan agar supaya pengawasan prepentif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian terjaminlah kepastian hukum antara kedua belah pihak dan terlebih penting lagi adalah para petani penggarap dapat dengan tenang bekerja selama waktu yang telah ditentukan dari kemungkinan ulah dari pemilik tanah.

Mengenai pembagian hasil tanahnya yaitu berapa yang harus diterima penggarap dan berapa yang harus diterima oleh pemilik tanah kita dapat melihat pasal 7

ayat 1 Undang-undang ini yang menegaskan bahwa besarnya bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah Swatantara tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat Swatantara Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat tersebut.

Kita sadari bersama bahwa daerah-daerah di Indonesia tidak sama tingkat kesuburan tanahnya, kepadatan penduduknya, luas arealnya serta faktor-faktor ekonomis lainnya. Maka dengan menyerahkan kepada para Bupati/Kepala Daerah untuk menetapkan imbalan bagi hasilnya sangatlah relevan dengan tujuan Undang-undang ini.

Perjanjian bagi hasil penggarapan sawah menurut Hukum Adat

Diberbagai daerah di Indonesia perjanjian bagi hasil dapat diketahui dari istilah-istilah masyarakat setempat seperti di Kecamatan Bontonompo pada khususnya atau di Kabupaten Gowa pada umumnya memakai istilah "*tesang*".

Dasar perjanjian bagi hasil menurut hukum adat ialah si pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan atau kemauan untuk mengerjakan tanahnya akan tetapi menginginkan agar tanahnya dapat menghasilkan sesuatu.

Maka dengan begitu ia menyuruh orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan menyerahkan sebagian hasilnya kepada yang mengerjakannya.

Sedangkan ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian dilakukan dengan tidak tertulis, jadi hanya dengan lisan saja tanpa suatu akte perjanjian.
- b. Bantuan Kepala Desa/Kepala Kelurahan tidak diperlukan
- c. Jangka waktu pada umumnya relatif singkat yaitu berakhir setelah sekali panen.
- d. Peralihan dari pemilik kepada pihak lain misalnya jual tahunan atau jual gadai tidak menghapuskan hak penggarap.
- e. Penggarap dapat dianggap pemilik tanaman yang ada di atas tanah yang ia garap dengan kewajiban menyerahkan sebahagian dari hasil sawah tersebut.
- f. Bagian masing-masing pihak ditentukan dengan ketentuan menurut perbandingan tertentu yaitu 1:1 apabila pemilik tanah dan penggarap sama-sama menyediakan bibit, pupuk serta obat-obatan dan 2:1 apabila pemilik tinggal menunggu hasilnya saja.

F. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil

1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Berbicara tentang bentuk perjanjian bagi hasil, maka menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 Un-

dang-undang Nomor 2 tahun 1960 kembali penulis kutip sebagai berikut: Perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan dan disaksikan oleh 2 orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa suatu perjanjian atas persetujuan bagi hasil atau sebidang tanah garapan antara pemilik dan penggarap hanya dapat dianggap sah menurut hukum apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri.
- b. Harus dibuat dalam bentuk tertulis dihadapan Kepala Desa.
- c. Harus disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- d. Harus disahkan oleh Camat setempat.

Menurut penulis bahwa ketentuan yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 sebagaimana tersebut di atas, oleh pembuat Undang-undang tentunya adalah bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pemilik dan penggarap dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Perjanjian bagi hasil sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 jika

dikaitkan dengan keadaan dan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Bontonompo, maka ketentuan pasal 3 tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bontonompo menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil yang terjadi memang selalu dan harus dilakukan oleh pemilik dan penggarap sendiri, yang berarti sama dengan unsur pertama dari ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960. Akan tetapi tidak dalam bentuk tertulis oleh pihak lain apalagi hendak dilakukan dihadapan Kepala Desa dan disaksikan oleh Camat. Sebagaimana yang dikatakan Bapak A. Syamsuddin:

"Perjanjian bagi hasil atau *tesang* dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap secara lisan dan tidak dihadapan Kepala Desa karena kami saling mempercayai antara satu sama lain".²⁴

Perjanjian bagi hasil di Kecamatan Bontonompo hanya dilakukan secara lisan dapat dimungkinkan karena adanya pengaruh yang masih kuat dari aturan hukum adat daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, sekalipun bentuk perjanjian bagi hasil hanya dilakukan secara lisan saja akan tetapi bagi mereka yang membuatnya (pemilik dan penggarap) per-

²⁴A. Syamsuddin, Petani (Pemilih Tanah), "Wawancara", tanggal 27 September 1998.

janjian tersebut dianggapnya telah sah dan mengikat.

Namun demikian, jika dilihat dari segi Undang-undang Nomor 2 tahun 1960, maka perjanjian tersebut adalah tidak sah karena hanya dilakukan secara lisan saja (Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960).

Dari rangkaian uraian di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa walaupun bentuk perjanjian bagi hasil telah diatur secara tegas di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960, akan tetapi kenyataan dalam praktek ketentuan tersebut belum dilaksanakan secara konsekwen.

Perjanjian bagi hasil dalam prakteknya sudah dianggap sah dan mengikat manakala sudah dilakukan sendiri oleh pemilik dan penggarap, walaupun hanya dalam bentuk lisan saja tanpa dilakukan di hadapan Kepala Desa dan tidak disaksikan oleh orang lain serta tidak mendapat pengesahan dari Camat. Kesimpulannya adalah bahwa masyarakat Kecamatan Bontonompo menghendaki cara yang mudah saja, tidak dengan prosedur yang berbelit-belit.

2. Isi Perjanjian Bagi Hasil

Jika kita bicara tentang isi perjanjian bagi hasil, maka berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di 8 Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontonompo menunjukkan bahwa isi perjanjian bagi hasil meliputi 3 hal, yaitu:

- a. Hak dan kewajiban pemilik
- b. Hak dan kewajiban penggarap
- c. Pembagian hasil tanaman

Ad.a. Hak dan kewajiban pemilik

Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil berhak memperoleh sebagian dari hasil sawahnya pada saat dilakukan panen sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sebagian dalam hal ini berarti sepedua bagian untuk pemilik dan seperdua bagian untuk penggarap, dengan ketentuan yang menyediakan pupuk, bibit dan obat-obatan ditanggung bersama. Atau sepertiga bagian untuk pemilik dan dua pertiga untuk penggarap dengan ketentuan yang menyediakan seluruhnya termasuk bibit, pupuk dan obat-obatan ditanggung pihak penggarap. Keduanya dapat dilalui tergantung kesepakatan mereka.

Di samping itu, pemilik tanah berhak pula untuk memperoleh tanahnya kembali dari penggarap dalam keadaan baik. Jika perjanjian bagi hasil itu sudah tidak dilanjutkan lagi oleh penggarap karena salah satu pihak merasa dirugikan atau karena sebab-sebab lainnya.

Selain daripada hak pemilik di atas, maka pemilik mempunyai beban kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu berkewajiban membayar pajak tanah yang bersangkutan-

an. Kewajiban itu tegas dinyatakan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960. di mana pasal itu memberikan kewajiban kepada pemilik untuk membayar tanah yang bersangkutan dan melarang membebaskan pembayaran pajak kepada penggarap. Lain halnya apabila penggarap itu adalah pemiliknya sendiri. Jadi secara formal kewajiban membayar pajak ada pada pemilik tanah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang.

Ad.b. Hak dan kewajiban penggarap

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap selain meletakkan hak dan kewajiban pemilik tanah juga meletakkan hak dan kewajiban penggarap.

Adapun yang menjadi hak daripada penggarap dalam hal perjanjian bagi hasil tersebut adalah berhak memperoleh sebagian dari tanah garapannya sebagai imbalan jasanya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Selain hak daripada penggarap sebagaimana yang diuraikan di atas, maka terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh penggarap.

Pada prakteknya di Kecamatan Bontonompo penggarap tanah persawahan berkewajiban memelihara/mengerjakan tanah persawahan tersebut dengan baik dan teratur sebagaimana seorang pemilik sendiri. Bilamana penggarap

sudah tidak mampu mengerjakan tanah tersebut secara baik dan teratur, maka penggarap berkewajiban mengembalikan-nya kepada pemilik tanah secara baik sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960.

Ad.c. Pembagian hasil tanah garapan

Dalam bagian ini penulis akan menguraikan tentang besar kecilnya hasil tanah yang diperoleh sebagai hak dari masing-masing pihak dalam perjanjian bagi hasil.

Adapun mengenai penentuan dan penetapan bagian masing-masing pihak dalam perjanjian bagi hasil itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 seperti yang disebutkan di depan bahwa: Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik tiap-tiap daerah Swatantara Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantara Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, keadaan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

G. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Dalam mewujudkan suatu perjanjian pada umumnya,

khususnya pada perjanjian bagi hasil, waktu atau jangka waktu berlakunya adalah memegang peranan yang sangat penting oleh karena dalam penetapan jangka waktu tersebut dapatlah diketahui tentang kapankah perjanjian itu mulai berlaku dan kapan pula saat berakhirnya.

Jangka waktu perjanjian itu menurut hukum adat di Kecamatan Bontonompo tidak ditentukan secara tegas mengenai batas minimum dan maksimumnya. Hal ini disebabkan karena perjanjian bagi hasil tersebut dilaksanakan sesuai dengan adanya kata sepakat saja.

Berkaitan dengan itu, maka jangka waktu perjanjian bagi hasil telah diatur secara tegas di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 seperti telah disebutkan terdahulu sebagai berikut: Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun.

Dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tersebut di atas, maka sudah barang tentu terjaminlah para penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak.

Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu

tersebut, maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk menjalankan segala daya upaya untuk mendapat hasil sebanyak mungkin. Hal yang demikian akan menambah keuntungan pula bagi pemilik karena bertambah pula bagian yang diterimanya.

Waktu minimum 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering dipandang cukup layak sebagai batas dalam hal mengadakan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap. Sekalipun sudah ditentukan secara tegas di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960, akan tetapi menurut ayat 2 pasal tersebut bahwa dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 di atas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.

Ketentuan pasal 4 ayat 2 di atas dimaksudkan untuk menampung hal-hal yang khusus, di mana terpaksa harus diadakan perjanjian yang jangka waktunya kurang dari 3 tahun untuk sawah dan kurang dari 5 tahun untuk tanah kering--misalnya pemilik perlu naik haji, sakit keras dan lain sebagainya. Dan hanya menghendaki mengadakan perjanjian hanya untuk satu tahun saja, karena tanah yang biasanya diusahakannya sendiri.

Apabila ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tersebut dikaitkan dengan keadaan yang terjadi dalam prakteknya di Kecamatan Bontonompo, maka nampaklah dengan jelas adanya perbedaan yang fundamental.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perbedaan tersebut adalah jangka waktu perjanjian. Bagi hasil di Kecamatan Bontonompo batas maksimum dan minimum tidak ada penggarisan secara tegas, akan tetapi tergantung dari pemiliknya. Hal ini disebabkan karena perjanjian bagi hasil di Kecamatan Bontonompo selalu dibuat dan dilaksanakan hanya sesuai dengan adanya kata sepakat yang berdasarkan atas saling percaya mempercayai tanpa dinyatakan dalam bentuk tertulis sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Konsekwensi daripada tidak diadakannya penggarisan secara tegas tentang jangka waktu perjanjian bagi hasil di Kecamatan Bontonompo adalah sering terjadinya perjanjian bagi hasil yang jangka waktunya relatif sangat singkat, di mana ada yang terjadi hanya sampai 2 tahun dan ada yang hanya satu kali panen saja.

Namun demikian, tidak dapat disangkal tentang adanya perjanjian bagi hasil yang berlangsung sampai puluhan tahun.

Hal tersebut agaknya tidak terlepas dari pengaruh

faktor bersedianya atau kesanggupan dari pihak penggarap untuk mengusahakan tanah tersebut, faktor kehendak dari kedua belah pihak serta faktor hasil yang diberikan atau dihasilkan oleh tanah garapan yang bersangkutan.

Menyinggung mengenai waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik dan penggarap, maka menurut ketentuan pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 seperti telah disebutkan terdahulu bahwa jika waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku sampai tanaman itu selesai dipanen, tetapi perjanjian itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

Suatu perjanjian bagi hasil tidak terputus karena adanya pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan oleh pemilik kepada orang lain (Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960). Hal ini berarti memberi jaminan bagi pihak penggarap, bahwa perjanjian bagi hasil itu akan berlangsung selama waktu yang telah ditentukan, sungguhpun tanah oleh pemilik sudah dipindahkan kepada orang lain. Dalam pada itu pemilik baru ada kemungkinan untuk meminta diputuskannya perjanjian tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan oleh pemilik kepada orang lain, maka semua hak dan kewajiban pemilik lama berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru (pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960).

Jika penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama (Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960). Ahli waris penggarap yang akan melanjutkan perjanjian bagi hasil tersebut haruslah ahli waris yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri baik yang diperolehnya secara menyewa, dengan perjanjian bagi hasil atau lainnya tidak akan lebih dari sekitar 3 hektar (Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960).

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 bahwa: Pemutusan perjanjian bagi hasil setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa;
- b. Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, di dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi ke-

wajibannya untuk menyerahkan sebagian hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

Ketentuan tersebut di atas adalah bertujuan untuk melindungi kepada pemilik, dan memang sudah selayaknya-lah kiranya diadakan kepentingan bagi pemilik. Bilamana kepentingannya dirugikan oleh penggarap karena kelailaian atau perbuatan yang bertentangan dengan apa yang telah mereka sepakati bersama pada waktu perjanjian diadakan untuk meminta diputuskan perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir.

Sudah menjadi kebiasaan di Kecamatan Bontonompo di mana pihak pemilik dapat menarik kembali tanahnya bilamana ia melihat bahwa pihak penggarap tidak dapat mengerjakan tanah tersebut secara baik dan teratur. Walaupun berlangsung hanya satu kali panen saja. Di lain pihak, penggarap juga bebas mengembalikan tanah garapan itu kepada pemilik bilamana tidak puas dengan keadaan yang dialaminya selama menggarap tanah tersebut. Dan biasanya penggarap sudah tidak sanggup lagi mengerjakannya karena tidak puas dengan hasil yang dicapai serta sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan

penggarap mengembalikan tanah yang bersangkutan kepada pemiliknya.

Dengan demikian pemilik tidak boleh memaksa penggarap untuk tetap mengerjakan sawahnya begitu pula sebaliknya. Di mana penggarap tidak boleh memaksa pemilik agar sawah yang bersangkutan tetap menjadi sawah garapannya.

Apabila diperjanjian bagi hasil itu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diharapkan, maka perjanjian bagi hasil tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, maka cepat membatalkan perjanjian yang sudah disepakati.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sekalipun jangka waktu perjanjian bagi hasil sudah diatur secara tegas di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960, akan tetapi kenyataannya dalam praktek ketentuan tersebut belum dilaksanakan secara konsekwen di Kecamatan Bontonombo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi merupakan istilah yang sering dipakai peneliti dalam melakukan penelitian lapangan. Istilah populasi ini sudah dianggap populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan peneliti. Namun secara umum tidak semua orang telah memahami makna dan pengertian populasi itu sendiri. Oleh karena itu peneliti merasa perlu mengetengahkan beberapa pendapat, di antaranya pendapat P. Joko Subagyo, SH. mengemukakan bahwa populasi adalah obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.¹

Pendapat lain mengenai pengertian populasi adalah:

Populasi seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki disebut populasi atau *universam*. Populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai suatu sifat

¹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Cet. I; Jakarta: Rinneka Cipta, 1991), h. 33.

yang sama.²

Kedua pandangan di atas, peneliti merasa bahwa pendapat-pendapat lainnya sudah terwakili. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa keseluruhan responden yang menjadi obyek penelitian itulah yang disebut dengan populasi, demikian pula dapat ditegaskan bahwa populasi adalah keseluruhan atau kumpulan orang/individu yang menjadi obyek penelitian.

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti menjadikan populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkecimpun dalam bidang pertanian dan peternakan yang mengarah kepada sistem bagi hasil bagi pemilik sawah/kebun dan penggarap.

2. Sampel

Jumlah populasi yang ada, tidak semuanya dapat diteliti, mengingat keterbatasan dana, waktu serta kapasitas yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti menetapkan sampel sebanyak 8 (delapan) desa/kelurahan dari 17 desa/kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Desa Bontolangkasa Utara
- b. Desa Jipang
- c. Desa Manjapai

²Sutrisno Hadi, *Statistik*, Jilid II (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), h. 257.

- d. Desa Barembeng
- e. Desa Sengka
- f. Kelurahan Kalase'rena
- g. Kelurahan Tamallayang
- h. Desa Kelurahan Bontonompo.

Kedelapan desa/kelurahan tersebut di atas, merupakan sampel dari populasi yang menjadikan sebagai sumber data yang diperoleh dari lapangan, dengan jumlah penduduk di Kecamatan Bontonompo sebanyak 58.086 jiwa.³

B. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan salah satu rangkaian pengumpulan data yang sering dipakai oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang akurat harus ditunjang oleh instrumen yang memadai. Adanya instrumen yang memadai dalam suatu kegiatan pengumpulan data, maka penelitian yang dilakukan itu akan menjadi lebih jelas dan terarah.

Instrumen yang dimaksudkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah merupakan salah satu Instrumen

³Sumber data: Laporan Kependudukan Kecamatan Bontonompo, bulan April 1998.

yang sering dipakai oleh seorang peneliti dalam upaya pengumpulan data di lapangan. Observasi ini dilakukan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat tani (penggarap) dan pemilik modal/pemilik tanah.

Observasi yang ditempuh oleh peneliti adalah observasi non partisipan, karena peneliti tidak turun langsung terlibat melainkan hanya sebagai pengamat/pemantau dari kegiatan yang telah membudaya di kalangan masyarakat tani yang ada di Kecamatan Bontonompo.

2. Interview

Salah satu cara selain observasi dalam pengumpulan data, peneliti dapat juga mempergunakan instrumen berupa interview atau wawancara, baik dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok kepada responden. Wawancara ini dilakukan kepada responden untuk mendapatkan informasi/data secara langsung dengan mengemukakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti.

Peneliti dalam melakukan wawancara ini, ditentukan kepada orang-orang tertentu, yaitu pemuka masyarakat, pemerintah setempat, pemilik modal/pemilik lahan dan penggarap tanah (petani). Oleh karena itu peneliti mewawancarai orang-orang yang berkompeten atau layak dimintai informasi.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan penelitian meliputi beberapa langkah, yaitu:

1. Menetapkan obyek atau pokok persoalan

Perlu diketahui bahwa tak ada satu pun penelitian ilmiah yang dilaksanakan tanpa adanya pokok persoalan/permasalahan, obyek yang ditetapkan.

Dengan demikian permasalahan pokok perlu ditetapkan agar lebih terarah tujuan pendidikan. Penetapan obyek tidak hanya berarti memberi isi dan meletakkan arah untuk kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan *research*, tetapi yang tidak kurang pentingnya adalah dalam banyak hal obyek pendekatan metodologi tertentu yang khususnya dipandang cocok untuk memecahkan persoalan.

2. Membatasi obyek atau pokok persoalan

Setelah menetapkan pokok persoalan atau obyek yang akan diteliti, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah membatasi obyek atau pokok persoalan. Langkah ini dimaksudkan untuk membatasi obyek yang akan diteliti serta memberikan formulasi yang tegas terhadap masalah yang diteliti. Pembatasan

terhadap masalah yang diteliti ini dimaksudkan agar Tidak terjadi kesimpang siuran dalam penelitian.

3. Mengumpulkan data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui dua sumber, yaitu sumber yang berasal dari literatur kepustakaan dan sumber yang berasal dari lapangan penelitian. Data yang bersumber dari literatur kepustakaan, peneliti memperolehnya melalui hasil bacaan yang berkaitan dengan kajian yang diteliti, apakah dengan kutipan langsung maupun dengan kutipan tak langsung. Sedangkan data yang diperoleh melalui lapangan, peneliti memperoleh data tersebut dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada obyek penelitian.

D. Teknik Analisa Data

Setelah peneliti mengumpulkan data yang diperlukan, baik di lapangan maupun melalui kepustakaan, maka peneliti akan melakukan analisa data dengan menempuh cara sebagai berikut:

1. Teknik *induktif*, yaitu teknik menganalisa data dengan bertitik tolak dari data yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

2. Teknik *deduktif*, yaitu teknik menganalisa data

dengan bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Interpretasi data penelitian, ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis baik secara *induktif* maupun *deduktif*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Jenis-jenis Tesang di kalangan Masyarakat Kecamatan Bontonompo

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bagi hasil (*attesang*) di kalangan masyarakat tani, peternak dan sebagainya, maka diperlukan adanya uraian jenis-jenis *tesang* yang sedang berlaku di masyarakat setempat.

Adapun jenis-jenis *tesang* dimaksud antara lain:

1. Tesang butta basah (sawah)

Tesang semacam ini merupakan kebiasaan yang sudah membudaya dan banyak dilaksanakan oleh masyarakat tani di Kecamatan Bontonompo, hal ini disebabkan oleh karena areal wilayah pada umumnya adalah daerah persawahan.

Tesang butta basah (sawah), artinya pelaksanaan bagi hasil lewat areal persawahan. Areal persawahan menjadi obyek perjanjian berlangsung 2 (dua) kali dalam setahun, dan setiap panen itu diadakan pembagian bagi hasil antara penggarap dan pemilik sawah.

Pembagian bagi hasil bagi penggarap tanah dan

pemilik tergantung dari kesepakatan yang telah disepakati sebelum terjadi pengelolaan tanah garapan. Namun pada umumnya dilakukan oleh petani dengan sistem pembagian 3 berbanding 1, di mana penggarap memperoleh tiga bahagian. Apabila obyek *tesang* ini menghasilkan seluruhnya 60 (enam puluh) karung gabah setelah dikeluarkan upah bagi orang yang turut membantu panen. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penggarap memperoleh 40 (empat puluh) karung gabah, sedang pemilik sawah memperoleh 20 (dua puluh) karung gabah, pemilik memperoleh 1/3 bagian.¹

Pelaksanaan pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil (*tesang*) di kalangan masyarakat tani, biasanya penggarap yang menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan *tesang* tersebut, pemilik hanya menyerahkan sawahnya kepada penggarap untuk dikelola oleh petani yang hasilnya akan dinikmati bersama, dengan demikian sudah sepantasnya penggarap memperoleh lebih banyak dibandingkan dengan pemilik sawah.

Sebaliknya, kalau pemilik sawah yang menyediakan bibitnya, pupuk untuk tanaman, dan pemeliharaannya dibebankan kepada penggarap, maka pembagian antara pemilik dan penggarap akan seimbang, oleh karena itu

¹S. Dg. Sese, Tokoh Masyarakat Desa Bontolangkasa Selatan, "Wawancara", tanggal 15 Nopember 1998.

dapat dipahami bahwa pembagian hasil ini tergantung dari kata mufakat mereka bersama.

2. *Tesang Butta Kalotoro'* (Lahan Kering)

Pelaksanaan pengelolaan tanah kering di wilayah Kecamatan Bontonompo biasanya sebelum dilakukan penggarapan terlebih dahulu diadakan kesepakatan antara kedua belah pihak, apakah pemilik yang mempersiapkan bibit ataukah ditanggung sendiri oleh penggarap sekaligus membicarakan bagian masing-masing yang akan diperoleh.

Apabila obyek *tesang* ini telah berhasil dengan baik, maka hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pembagian hasil garapan tanah ini, pada umumnya dibagi masing-masing pihak memperoleh 1/2 jika pemilik lahan yang menyediakan bibit dan pupuknya, masing-masing kedua belah pihak bekerjasama membelinya.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tani (penggarap) dan pemilik tanah, nampaknya ada dua hal *tesang buuta kalotoro'* (lahan kering) di Desa Bontolangkasa Selatan, yaitu:

a. *Tesang butta kalotoro'* (lahan kering), khusus perkebunan yang tidak memungkinkan ditanami padi karena tidak ada irigasi. Oleh karena itu lahan kering semacam

²H.M. Dg. Kawang, Tokoh Masyarakat Kelurahan Kalase'rena, "Wawancara", tanggal 30 Nopember 1998.

ini biasanya ditanami jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau dsb.³

Adapun pelaksanaan pembagian hasil lahan tersebut tergantung dari kesepakatan mereka bersama (sama dengan poin 2 tersebut di atas).

b. *Tesang butta kalotoro'* (lahan kering), lahan ini adalah berupa sawah yang berfungsi ganda, yaitu dapat ditanami bibit padi karena ada pengairan, bahkan ada sebagian sawah yang dapat teririgasi air dengan dua kali panen, ada juga hanya satu kali. Selain dari padi tersebut, juga dapat ditanami dengan tanaman lain seperti yang dikemukakan pada poin a di atas.⁴

Adapun sistem pembagian hasil lahan tersebut dapat dibagi dua, yaitu:

1) Pembagian bagi hasil antara pemilik dan penggarap ditentukan oleh penggarap atau dengan kata lain tergantung keikhlasan penggarap. Hal ini terjadi oleh karena tidak ada pembicaraan sebelumnya, bahkan sawah pun digarap kadang terjadi hanya sekedar minta izin kepada pemilik sawah tanpa membicarakan berapa yang akan diperoleh oleh pemilik dan penggarap setelah berhasil

³Mahmud Dg. Jarung, Petani Desa Manjapai, "Wawancara", tanggal 16 Nopember 1998.

⁴Dg. Taba, Petani Desa Jipang, "Wawancara", tanggal 16 Nopember 1998.

garapnya.⁵

Berkaitan dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa pembagian semacam ini akan menimbulkan kecemburuan sosial oleh karena tidak ada perjanjian yang disepakati sebelumnya di antara mereka, hal ini dimungkinkan terjadi oleh karena hanya ditentukan sepihak (penggarap), tergantung berapa keikhlasan mereka. Di sisi lain akan melahirkan praduga yang kurang baik di antara mereka, bahkan ada di antara pemilik sawah tidak mengizinkan lagi menggarap pada periode berikutnya dengan alasan pembagian yang diperolehnya tidak seimbang dengan hasil sawahnya (sangat minim).⁶ Oleh karena itu, peneliti berkesimpulan bahwa musyawarah sebelum penggarapan itu dilakukan sangat diperlukan, atau dengan kata lain perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2) Pembagian bagi hasil antara pemilik dan penggarap berdasarkan dengan kesepakatan bersama sebelum terjadi pengelolaan oleh penggarap. Pembagian ini tidak tergantung dari penggarap, melainkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Dan biasanya di masyarakat

⁵Dg. Tata, Petani desa Jipang, "Wawancara", tanggal 16 Nopember 1998.

⁶B. Dg. Bella, Kepala Dusun Passallangan, Desa Bontolangkasa, "Wawancara", tanggal 20 Nopember 1998.

Kecamatan Bontonompo ini, mulai dari bibit, pupuk dan sebagainya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap, dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan mereka. Dengan demikian akan terwujudlah di tengah-tengah masyarakat saling tolong-menolong di kalangan mereka, rasa solidaritas dan kekeluargaan semakin terjalin.

3. *Tesang* Binatang Ternak (*Tesang Olo'-olo'*)

Pelaksanaan *tesang* binatang ternak, berbeda dengan *tesang* sawah atau tanah kering, perbedaan ini nampak pada obyek dan pelaksanaan *tesang* itu sendiri. Obyek *tesang* yang terjadi di Kecamatan Bontonompo berupa binatang ternak yang kadangkala berakibat resiko tinggi bahkan kadang tidak membawa hasil, hal ini mungkin terjadi karena mati, sakit dan kemungkinan lain karena dicuri. Oleh karena itu bila terjadi yang demikian, maka orang yang *tesang* harus sesegera mungkin menyampaikan kejadian yang dialami kepada orang yang memberi *tesang* (pemilik). Dengan demikian perjanjian tersebut terhapus dengan sendirinya tanpa harus diganti oleh pihak yang *bertesang* dan begitu pun sebaliknya.

Tesang binatang ternak ini, pembagiannya sangat ditentukan oleh kedua belah pihak, dan menurut kebiasaan yang ditempuh oleh mereka adalah dengan mengadakan perjanjian sebelum *tesang* berlanjut.

Pembagian *tesang* yang dilakukan oleh kedua belah pihak ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Binatang ternak yang *ditesang* oleh yang *bertesang* biasanya anak yang pertama diserahkan kepada pemilik ternak, dan pada anak yang kedua itu diserahkan (dimiliki) oleh yang *bertesang* (pemelihara).
- b. Binatang ternak yang induknya melahirkan kemudian, maka anaknya itu akan dibagi dua dengan cara menjualnya lalu kemudian dibagi antara pemilik ternak dan yang *bertesang*.⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil antara pemilik ternak dan yang *bertesang* tergantung kemufakatan yang ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu selalu diawali musyawarah antara kedua belah pihak, dan tidak saling merugikan bahkan dengan sistem ini saling tolong-menolong yang menonjol.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil di Kecamatan Bontonompo

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, maka dapat dipahami bahwa pada hakekatnya kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh masyarakat dalam sistem bagi hasil di kecamatan Bontonompo me-

⁷K. Dg. Katti, Petani Desa Jipang, "Wawancara", tanggal 26 Nopember 1998.

upakan upaya yang sangat berharga bagi masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan mereka. Dengan upaya tersebut, ajaran Islam pun sangat menghargai serta memberi petunjuk kepada mereka yang ingin bercocok tanam. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. di dalam surah 'Abasa ayat 24 s/d 32 yang berbunyi:

فلينظر الا نسمن الى طعامه ، انا صبنا الماء صبا ، ثم ثقفنا الارض
شقا ، فانبتنا فيها حبا ، وزيتونا ونخلا ، وحدائق غلبا ، موافكة
وابا ، متاعا لكم ولا نعامكم .

Terjemahnya:

'Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, sesungguhnya Allah benar-benar telah menurunkan air dari langit kemudian Kami telah belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun, dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu'.⁸

Dalam ayat lain dijelaskan pula mengenai pertanian ini sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Qalam ayat 22:

ان اغدوا على حدثكم ان كنتم مارمين .

⁸Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Pelita II, 1978/1979), h. 1025-1026. .

Terjemahnya:

'Pergilah kamu di waktu pagi (ini) ke kebun jika kamu hendak memetik buahnya'.⁹

Juga Rasulullah saw. mengatakan dalam salah satu hadis-nya yang diriwayatkan al-Hamzah:

لَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرَ مَنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْبًا
مَعْلُومًا •

Artinya:

'Hendaklah seorang di antara kamu memberikan tanahnya untuk digarap, itu lebih baik daripada ia memungut bayaran tertentu'.¹⁰

Dari ayat dan hadis tersebut di atas, kita dapat memahami bahwa ajaran Islam pada dasarnya membolehkan seseorang untuk mencari rezki melalui pertanian, sebagaimana manusia dituntut untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, demikian pula halnya dituntut untuk mengolah tanahnya sendiri, dan kalau ia tidak sanggup, maka ia dibolehkan untuk memberikan tanahnya itu kepada orang lain untuk digarap dengan sistem bagi hasil secara benar dan adil.

Memberikan tanah atau lahan kepada orang lain untuk digarap dengan perjanjian bagi hasil, juga telah dilakukan pada masa Rasulullah saw., yaitu Rasulullah

⁹ *Ibid.*, h. 962.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fihi Sunnah*, Jilid 12, diterjemahkan oleh H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), h. 149.

saw. memberikan tanahnya kepada penduduk Khaibar untuk dikerjakan (ditanami) dengan sistem perjanjian bagi hasil. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary yang berbunyi:

حديث ابن عمر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عمله
خير بشر بخير منها من ثمرها وزرع (رواه البخار ومسلم)

Artinya:

'Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Menyerahkan sah ladang dan tegal kepada penduduk Khaibar dengan menyerahkan separuh dari penghasilannya berupa kurma atau buah dan tanaman'.¹¹

Dari ungkapan tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan *tesang* (bagi hasil) baik berupa sawah basah, ladang kering dan *tesang* binatang ternak yang dilakukan oleh masyarakat tani di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa adalah dibenarkan oleh ajaran Islam karena sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. kepada penduduk Khaibar tersebut di atas.

¹¹ *Ibid.*, h.

BAB V

P E N U T U P

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab lima ini merupakan bab penutup yang di dalamnya dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai intisari dari beberapa pembahasan. Di samping itu dalam bagian ini juga akan dikemukakan saran sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan bagi pembaca dan lebih khusus lagi masyarakat yang dijadikan objek penelitian.

A. Kesimpulan

1. Penggarapan tanah pertanian dengan sistem bagi hasil khususnya bagi hasil persawahan telah lama dikenal oleh masyarakat Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, dan sistem ini telah dipraktekkan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.

2. Bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat tani di Kecamatan Bontonompo adalah usaha kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola dengan perjanjian bahwa hasilnya akan

dibagi. apakah hasilnya dibagi dua, dibagi tiga atau dibagi empat. hal ini tergantung kesepakatan mereka pada waktu akad.

3. Tatacara pembagian hasil di Kecamatan Bontonompo dilakukan dengan pembagian tiga berbanding satu di mana pemilik memperoleh $\frac{1}{3}$ dan penggarap memperoleh $\frac{2}{3}$.

4. Bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bontonompo, juga telah dikenal dan dipraktekkan pada masa Rasulullah saw. serta para sahabat beliau.

5. Usaha bagi hasil dalam bentuk *muzaraah* di Kecamatan Bontonompo dikenal dengan istilah *tesang* (*attesang*), di mana pemilik tanah/sawah pertanian menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap, dan biaya pupuk, obat-obatan ditanggung oleh petani penggarap.

6. Ajaran Islam membolehkan dan menganjurkan adanya kerjasama dalam bentuk pertanian bagi hasil, demikian halnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, dengan catatan dalam pelaksanaan tidak mengandung unsur-unsur penganiayaan, yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik pemilik maupun penggarap.

7. Usaha pertanian bagi hasil yang dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, baik pelaksanaan maupun cara pembagiannya adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam maupun Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1960.

B. *Saran-saran*

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang telah dipraktikkan oleh masyarakat petani di Kecamatan Bontonompo, hendaknya dilestarikan dan dipertahankan, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai wadah saling tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di daerah ini.

2. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Bontonompo hendaknya dipertahankan karena sejalan dengan syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

3. Bagi pemilik areal pertanian yang luas, diharapkan agar kiranya senantiasa membantu petani yang tidak memiliki areal pertanian, demikian halnya bagi masyarakat peternak yang memungkinkan untuk mengalihkan binatang ternaknya kepada orang lain untuk ditiesang.

KEPUSTAKAAN

Alquran al-Karim.

Abdoerraoef, DR., SH., *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Sebuah Studi Perbandingan), Jakarta-Indonesia: Bulan Bintang, 1970.

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikri, 1981.

Cahyono, Bambang Tri, *Ekonomi Pertanahan*, Yogyakarta: Liberty, 1983.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Departemen Dalam Negeri, Dirjen Agraria, *Buku Tuntutan Bagi Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Yayasan Budaya Bina Sejahtera, t.th.

Djatismika, Rahmat, Prof., DR., *Pola Hidup Muslim*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Hanafi, A., *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

———, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Husni Assiba'i, Mustafa, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1981.

Harsono, Boedi, Prof., SH., *Hukum Agraria (Himpunan Peraturan Hukum Tanah)*, t.t.: Jambatan, 1975.

Hadikusuma, Hilman, SH., *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1980.

Mannan, M. Abdul, Prof., MA., Ph.D., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakah, 1993.

- Parlindungan, Prof., DR., A.P., *UndangpUndang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Study Komparatif)*, Bandung: Angkasa, 1989.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1984.
- Rafiq, Ahmad, Drs., MA., *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan oleh Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Sudarsono, Drs., SH., *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- ash-Shiddiegy, Hasbi, Prof., Dr., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhi Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.
- Scheltema, A.M.P.A., *Bagi Hasil Di Hindia Belanda*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah Wasy-Syari'ah*, Cet. III; Jakarta: Darul Qalam, 1966.
- Toha, Halili, SH., Prof., DR., *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Ya'qub, Hamzah, DR., *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Zuhri, H. Moh., Drs., dkk., *Fikih Empat Mazhab*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994.
-

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ALAUDDIN UJUNG PANDANG

Jln. Sultan Alauddin No. 63 Tlp. 864928 - 864931

SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN
UJUNG PANDANG

NOMOR: 94 Tahun 1998

Tentang

PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN BIAYA DIKS
IAIN ALAUDDIN TAHUN 1998/1999

Rektor IAIN Alauddin setelah:

- Menimbang:** Bahwa dalam tahun anggaran 1998/1999, dosen IAIN Alauddin Ujungpandang akan melaksanakan penelitian sebanyak 26 judul, terdiri dari 24 judul penelitian mandiri dan 2 judul penelitian kolektif.
- Mengingat:**
1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Agama RI, No. 232 tahun 1991 dan No. 289 tentang wewenang menandatangani Surat Keputusan.
 4. Surat Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama RI No. E/TL.00/AZ/1878 A/1998, tentang petunjuk teknis pengelolaan penelitian.
- Memperhatikan:** Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa/Penyeleksi proposal Penelitian dosen IAIN Alauddin tahun 1998/1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN UJUNG-PANDANG TENTANG PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN BIAYA DIKS TAHUN 1998/1999.

- Pertama: Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Peneliti dan Ketua Peneliti.
- Kedua: Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan kepada DIKS IAIN Alauddin tahun 1998/1999.
- Ketiga: Waktu pelaksanaan penelitian ini selama enam bulan mulai tanggal 7 Juli 1998 sampai tanggal 7 Januari 1999.
- Keempat: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki bila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari.
- Kelima: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI UJUNG Pandang
PADA TANGGAL 7 Juli 1998 M.
Bertepatan dengan 13.R.Awal 1419 H.



Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth.

1. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI., di Jakarta.
2. Sekjen Departemen Agama RI., di Jakarta.
3. Irjen Departemen Agama RI., di Jakarta.
4. Kepala Biro Perencanaan Departemen Agama RI., di Jakarta.
5. Kepala KPKN Ujungpandang, di Ujungpandang.
6. Para Dekan Fakultas dalam lingkungan IAIN Alauddin di Ujungpandang.
7. Kepala Pusat Penelitian IAIN Alauddin, di Ujungpandang.
8. Bendaharawan IAIN Alauddin Ujungpandang

**DAFTAR PENELITIAN BIAYA DIKS IAIN ALAUDDIN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

NO	PENELITI/KETUA PENELITI/PANGKAT	JUDUL PENELITIAN	FAKULTAS/ UNIT KERJA	JENIS PENELITIAN	KONSULTAN
1	Dr. Abd. Karim Hafid, MA/ IV-b	Orientasi Pengajaran Bahasa Arab Pada Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) IAIN Alauddin	Tarbiyah	Mandiri	
2	Drs. Muh. Wayong, M.Ed. III-b	Pengaruh Industri Terhadap Keluarga (Studi Tentang Peranan Keluarga Terhadap Pendidikan Agama Anak Bagi Buruh Pabrik Triples di Kabupaten Luwu)	Tarbiyah	Mandiri	Dr.M.Nasir Mahmud
3	Drs. Abd. Wahid. M. III-b	Nilai Normatif Dalam Kerangka Priorisasi Perkembangan Jiwa Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri No. 151 Kecamatan Sinjai Borong.	Tarbiyah	Mandiri	Prof.Dr.H.- Mappangano
4	Drs. Mustamin IV-o	Pandangan Masyarakat Islam terhadap Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam Yang Berfungsi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan	Tarbiyah	Mandiri	
5	Abkam Jayadi, SH/ IV-a	Pengamalan Ajaran Agama Tenaga Kerja Muslim Pada Perusahaan PT. Indofood di Kotamadya Ujungpendang	Syariah	Mandiri	
6	Drs. Syamsuddin Ranja III-o	Penggarapan Tanah dengan Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Adat di Tinjau dari Segi Hukum Islam di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa	Syariah	Mandiri	Dr.H.A.Muin Salim
7	K.H. M. Sanusi Baco, Lc. IV-a	Pendayagunaan Zakat Sebagai Dana Kesejahteraan Bagi Umat Islam di Kabupaten Sinjai (Sebagai Potensi Tersebut).	Syariah	Mandiri	

8	Dra. Hj. Rahmatiah HL. III-a	Hisab - Rukyat dan Peranan Rumus Segitiga Bola	Syariah	Mandiri	Drs.H.Minha- juddin,M.A.
9	Dr. H. Abd. Rahim Yunus, MA. IV-a	Sikap Masyarakat di Sekitar Masjid Terhadap Suara Pengajian Alquran dan Tarhim Sebelum Azan Pada Setiap Waktu Shalat di Kota Madya Ujungpandeang	Adab	Mandiri	
10	Drs. Maqbul Rasyid, MS. III-c	Sistem Pengajaran Membaca Alquran Taman Pendidikan Alquran (TPA) Ujungpandang	Tarbiyah	Mandiri	Prof.Dr.H.Ra- dhi Al-Hafid
11	Drs. Sabaruddin Garancang, MA/TV-a	Kemampuan Bahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri (MAKN) Ujungpandang	Tarbiyah	Mandiri	
12	Drs. H. Hasyim Aidid, MA/TV-a	Piagam Madinah dan UUD RI 1945 Tinjauan Negara Hukum Yang Sejahtera	Syariah	Mandiri	
13	Dra. Sitti Nursiah Hamid III-d	Sistem Informasi Managemen (SIM) Dalam Rangka Otomasi Komputerisasi Perpustakaan IAIN Alauddin Ujungpandang	Perpustakaan	Mandiri	
14	Drs. Sabri Samin / III-d	Persepsi Ulama Kotamadya Ujungpandang Terhadap Pembaharuan Pemikiran dan Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia	Syariah	Mandiri	Dr.H.A.Muin Salim
15	Drs. Mardan, M.Ag. III-c	Perspektif Perumpamaan (al-Amts'al) Dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Dengan Pendekatan Maudhu'iy)	Adab	Mandiri	
16	Drs. Husain Sulaiman III-c	Pandangan Masyarakat Kampus IAIN Alauddin Ujungpandang tentang Jilbab	Dakwah	Mandiri	Drs.H.Minha- juddin, M.A.
17	Drs. Sangkala Mahmud,M.Ag.	Agama Wahyu dan Agama Budaya dalam al-Qur'an	Dakwah	Mandiri	
18	Drs. Nihaya, M./TV-c	Pengaruh Pemikiran Mu'tazilah Terhadap Mahasiswa IAIN Alauddin Ujungpandang	Ushuluddin	Mandiri	
19	Drs. Nasir Baki, M.A. IV-a	Studi Perbandingan Ketaatan Beragama Antara Suku Bugis dan Makassar di KMUP	Tarbiyah	Mandiri	

20	Drs. Lomba Sultan, MA IV-a	Pelaksanaan Peradilan Pada Masa Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan RI (Studi Tentang Kompetensi Hakim dalam Penegakan Keadilan dan Kebenaran).	Syariah	Mandiri	
21	Drs.M. Rusydi/ III-b	Hadis-Hadis Akhlak dalam Jami' al-Shahih li al-Tumudzi (Sebuah Telaah Kritis Hadis).	Tarbiyah	Mandiri	Prof.Dr.Hj.A Rasdiyanah
22	Drs.H.A.Rauf Aliyah, MA IV-a	Kisah-Kisah Nabi Yusuf a.s. Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Segi-Segi Kesusasteraan al-Qur'an)	Adab	Mandiri	
23	Drs.Muhammadiyah Amin, M.Ag. III-c	Metode Penyelesaian Hadis Yang Saling Bertentangan Menurut Imam Syafi'i	Syariah	Mandiri	
24	Prof.Dr.H. Mappanganro IV-d	Persepsi Masyarakat Tentang Industrialisasi (Studi tentang Perubahan Sosial Keagamaan Masyarakat Sekitar Industri Gula di Kab. Takalar Sulawesi Selatan	Tarbiyah	Mandiri	
25	Drs. Dudung Abdullah III-d dkk	Hubungan Ketaatan Beragama Dengan Disiplin Kerja Pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan	Syariah	Kolektif	Dr.H.A.Muin Salim
26	Dr.Moh. Natsir Mahmud dkk IV-a	Pandangan Orientalis Terhadap Fundamentalisme dan Modernisme Islam (Sebuah Telaah Kritis)	Pusat Penelitian	Kolektif	


 Uin Ar-Raniry, 7 Juli 1998
 REKTOR
 Dr.H.A.MUIN SALIM
 NIP. 150 036 705

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA
CAMAT BONTONOMPO
JALAN BONTOCARADDE NO. 50 KODE POS 92153

Tamallayang, 28 Nopember

1998

K e p a d a

Nomor : 070/14 /^{XI} /1998
Lampiran : --
Perihal : Izin Penelitian.

Yth. 1. Kedes Bontolangkese Utara
2. Kedes Jipang
3. Kedes Manjapai
4. Kedes Berembong
5. Kedes Sengka
6. Kedes Kelaso'rona
7. Kedes Tamallayang
8. KES. Bontonompo

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Masing-masing di tempat
Tingkat II Gowa Nomor 070/285/KSP/1998 tanggal 29 Oktober 1998
sebagaimana pokok surat tersebut diatas, dengan ini disampaikan
bahwa oknum tersebut dibawah ini :

N a m a : Drs. Syamsuddin Ranja
Tempat/Tanggal Lahir : Bontonompo, 31 Desember 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Dosen Iain Alauddin Ujung Pandang
A l a m a t : Jl. Dg. Ngedde 6 P. Tambung Ujung Pandang

Bermaksud akan mengadakan penelitian diwilayah Saudara dalam
rangka penelitian dengan Judul : PENGARAPAN TANAH DENGAN SISTEM
BAGI HASIL MENURUT HUKUM ADAT ISTIADAT DITINJAU DARI S E G I HUKUM
ISLAM DI KECAMATAN BONTONOMPO "

S e l a m a : 5 (lima) bulan s/d 07 Januari 1998
Pengikut/Anggota Team : tidak ada

Pada Prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut
dengan ketentuan :

1. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
2. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Camat Bontonompo.

Untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud, kepada Saudara
diharapkan dapat memberi bantuan seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan seperlunya.

An. CAMAT BONTONOMPO.
Drs. KAMALUDDIN SERANG

NIP : 580 013 155

Tembusan :

1. Pembantu Bupati Wilayah II di Limbung
2. Muspika Kecamatan Bontonompo
3. Yang bersangkutan
4. A r s i p.